

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki corak budaya paling unik dan beragam. Indonesia merupakan salah satu *nation-state* yang majemuk dan terbesar di dunia dibuktikan oleh kenyataan sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.508 pulau baik yang dihuni maupun tidak. Secara etnik, terdapat 1.128 suku bangsa. Keberagaman dan kekayaan budaya tersebut ditambah pula dari aspek bahasa, dimana terdapat tiga bahasa utama dengan 1211 bahasa dialek (Badan Pusat Statistik, 2014, hlm. 48)

Melalui semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, Indonesia paten dengan identitas pluralisme dan multikulturalismenya. Ketua harian Komisi Nasional untuk *United Nations Education, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengatakan kekayaan suku dengan bahasa daerah dan pulau membuat Indonesia memiliki khasanah budaya yang beragam. (Abdillah, 2011). Dalam pandangan UNESCO hal tersebut merupakan kedahsyatan bagaimana Indonesia bisa mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keutuhan bangsa padahal memiliki suku yang berbeda-beda.

Berbicara mengenai kebudayaan, menurut Geertz (1992, hlm. 5), kebudayaan diartikan sebagai berikut

Kebudayaan adalah pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu warisan yang mengandung simbol atau makna khusus sehingga generasi satu ke generasi lainnya dapat berkomunikasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Indonesia sendiri dengan sekian banyak budaya di tiap-tiap daerahnya tentu memiliki keunikan masing-masing. Meski pada hakikatnya tetap bermuara pada falsafah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.

Chris Apandie, 2017

FALSAFAH HUMA BETANG SUKU DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN NILAI KEADABAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun pengertian kebudayaan Nasional Indonesia adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Menurut UUD 1945 Pasal 32 yaitu “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Kebudayaan nasional Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik itu pakaian adat, upacara adat, rumah adat, bahasa daerah, peralatan peninggalan sejarah, lagu daerah, dan masih banyak lagi unsur kebudayaan nasional yang lainnya. Pelaksanaan dari nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap unsur kebudayaan merupakan bukti pelestarian terhadap budaya. Terlebih lagi di Indonesia dengan segala kearifan budaya lokal daerahnya dapat menjadi sarana dalam membangun karakter warga negara yang beradab.

Kenyataannya saat ini kebudayaan Indonesia dirasa kian luntur. Eksistensi budaya asing yang masuk menjadi salah satu faktor mulai melunturnya kebudayaan daerah di Indonesia. Budaya sebagai identitas yang berarti ciri dan sifat khas yang melekat dapat dikatakan luntur bahkan mulai hilang. Hingga pada akhirnya Indonesia berujung pada krisis identitas dengan melunturnya budaya asli Indonesia. Hampir sepuluh karakteristik negatif yang dirumuskan oleh Thomas Lickona (1992, hlm. 13-18) terjadi dan mengemuka di negara ini, yakni: 1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; 2) penggunaan bahasa yang buruk; 3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan; 4) meningkatnya perilaku merusak diri (penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, serta bunuh diri); 5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 6) semakin menurunnya etos kerja; 7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 8) semakin rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warganegara; 9) membudayaakan ketidakjujuran; 10) adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.

Beberapa pemberitaan yang merujuk pada permasalahan yang sama salah satunya ialah “pengrusakan tempat ibadah, kekerasan mengatasnamakan agama, kasus-kasus megakorupsi yang tidak kunjung reda, tawuran antarwarga, serta kasus-kasus besar lain” (Suryanto, dalam Antaranews, 2011).

Chris Apandie, 2017

FALSAFAH HUMA BETANG SUKU DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN NILAI KEADABAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kemudian pengrusakan cagar budaya seperti makam bersejarah di Yogyakarta juga membuktikan indikasi melunturnya nilai-nilai keindonesiaan.

Pengrusakan makam itu termasuk pendekatan benturan budaya. Seolah-olah makam itu suatu yang dianggap melakukan penyimpangan, lalu disingkirkan. Padahal tidak seperti itu. Ini merupakan fakta melunturnya keindonesiaan yang ada di Yogyakarta. (Dirjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, dalam Ridarineni, 2013)

Banyak faktor yang melatarbelakangi pengrusakan cagar budaya dan luntarnya kecintaan terhadap budaya Indonesia. Seperti halnya sikap tidak peduli, keinginan yang kian tidak terbatas, sehingga menyebabkan manusia lupa bahwa sistem kebudayaan tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dipegang teguh dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sistem kebudayaan selalu menjadi faktor determinan dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Sobary (2000, hlm. 6) menilai bahwa

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi kebudayaan yang patologis, hal ini diperkuat dengan munculnya perilaku anarkhis seperti pengrusakan, penganiayaan, dan pemaksaan kehendak yang terjadi. Keadaan inilah yang dikatakan sebagai hilangnya nilai-nilai luhur yang dibanggakan sebagai gambaran bangsa Indonesia yang baik dan beradab.

Penelitian ini mengangkat kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya pada ruang lingkup Suku Dayak *Ngaju*. Hal ini dilatar belakangi pula salah satunya oleh keresahan peneliti bahwa sistem kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah yang sarat dengan nilai-nilai budaya hanya dikenal dan dimengerti secara terbatas oleh orang-orang tua tertentu saja. Nilai budaya yang digambarkan dalam legenda pun diperkirakan banyak yang sudah mulai luntur. Kemajuan teknologi dan pascamodernisasi diduga ikut mendukung luntarnya makna dan nilai budaya setempat.

Berbicara mengenai hal-hal yang melatarbelakangi perlunya lagi kajian tentang nilai-nilai luhur yang ada pada sistem kebudayaan suatu daerah atau suku tertentu, kita kembali lagi pada keresahan tentang pengrusakan yang terjadi terhadap beberapa peninggalan budaya lokal diperparah dengan keterpurukan budaya yang ditandai dengan kecintaan para generasi muda terhadap budaya asing. Hal ini diperkuat oleh pemberitaan di media massa bahwa “perilaku imitasi generasi muda saat ini yang lebih

Chris Apandje, 2017

FALSAFAH HUMA BETANG SUKU DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN NILAI KEADABAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengidolakan budaya luar menjadi salah satu faktor penyebab budaya lokal dan nasional telah perlahan-lahan ditinggalkan. Timbul fenomena dalam pergaulan generasi muda yang gaya hidup (*lifestyle*) mereka berkiblat pada budaya luar atau asing (Nainggolan, 2015).

Disamping pengrusakan cagar budaya dan luntarnya budaya nasional, ironisnya ada kekhawatiran yang selalu mengemuka dan indikasi relasi keberagamaan yang saat ini terjadi di kota Palangka Raya saat ini dianggap dalam keadaan semu. Dialog Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Palangka Raya dengan Rektor STAIN Palangka Raya pada 7 Juni 2013 lalu, mengafirmasi adanya potensi konflik keberagamaan yang laten terutama menyangkut relasi umat beragama. PMB No. 8 dan 9 tahun 2006, Pergub No. 1 tahun 2007 dan Perwal No. 8 tahun 2007 merupakan sederet regulasi yang menyulut polemik relasi antar umat beragama. Hasil dialog menyebutkan pemahaman sepatah terhadap peraturan tersebut kerap menimbulkan keresahan (Verawati, 2015, hlm. 170).

Kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk melihat salah satu kasus nya yang ada di Kalimantan Tengah, William (2007, hlm. 6) menyarankan Indonesia untuk kembali pada jati diri sebagai identitas bangsa dalam falsafah hidup yang menjunjung nilai-nilai dasar (*basic values*) sebagai bangsa yang besar dan bermoral. William menambahkan tiga langkah alternatif yang dapat dilakukan, yaitu

1. Memperbaharui sikap dasar dan perilaku anak bangsa yang terkait dengan nilai-nilai sosial, dan re-orientasi pada mentalitas kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kesetiakawanan
2. Perbaikan reputasi bangsa dimulai dengan mewujudkan mentalitas kedisiplinan secara nasional, terutama dalam ketaatan, dan penegakan hukum yang adil kepada semua lapisan masyarakat, dengan sistem control yang serius sebagai kunci dalam penegakan nilai-nilai dasar kehidupan bangsa
3. Membekali generasi muda dengan *character building* yang lebih sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

Pemberitaan yang telah dikemukakan tentu menyentak sekaligus menyadarkan pemerintah Indonesia bahkan warga masyarakat dari berbagai lapisan agar lekas memperhatikan budaya lokal yang mulai ditinggalkan. Meski telah dilindungi oleh kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, lempar

Chris Apandje, 2017

FALSAFAH HUMA BETANG SUKU DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN NILAI KEADABAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tanggung jawab di antara kalangan pekerja seni, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat luas kerap terjadi. Padahal sebenarnya upaya menjaga dan melestarikan budaya bangsa adalah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Nilai moral dan ahlak adalah urusan mentalitas dan nampaknya memang menjadi salah satu problematika kehidupan bangsa yang penting di abad 21 ini. Susanto (dalam Sardjiyo, 2011) menyebutkan dalam era globalisasi yang terbuka ini, terpaan informasi sangat memungkinkan seseorang mengadopsi nilai-nilai, pengetahuan, dan kebiasaan luar lingkungan sosialnya dan jauh dari jangkauannya secara fisik. Hal yang lebih parah adalah, saat nilai-nilai yang diadopsinya tidak sesuai dengan kultur ketimurannya, akar budaya dan norma agamanya.

Masalah mentalitas Sumber Daya Manusia (SDM), tentunya tidak lepas dari urusan pendidikan. Seperti dikemukakan Ibrahim (2007, hlm. 3-4) bahwa:

Konflik- konflik yang muncul di tanah air akhir-akhir ini sangat terkait dengan aspek sosial budaya, dan agama. Hal ini disebabkan karena lemahnya peran pendidikan yang menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial dalam era pluralitas. Membangun nilai kebersamaan dan solidaritas sosial bukanlah pekerjaan mudah, tetapi menuntut pendidikan nilai yang dilakukan secara terus menerus dengan penjiwaan setiap orang.

Terdapat poin penting dalam pernyataan Ibrahim di atas, bahwa pada dasarnya konflik dan keresahan yang muncul salah satunya dilatar belakangi oleh pewarisan nilai yang belum berhasil. Pewarisan nilai termasuk nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan proses transmisi nilai dan sosialisasi. Berlangsung dari sejak lahir hingga akhir hidup. Tujuan pewarisan budaya adalah membentuk sikap dan perilaku warga masyarakat sesuai dengan budaya masyarakatnya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan pewarisan nilai budaya yang diharapkan ialah dengan merevitalisasi kebudayaan lokal sebagai landasan kebudayaan nasional. Tujuannya tentu adalah menggali kembali budaya-budaya lokal yang pernah populer dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian revitalisasi kebudayaan dapat dimulai dari kearifan budaya lokal daerah salah satunya adalah filosofi rumah adat.

Filosofi rumah adat ini berangkat dari pemahaman mengenai tujuh unsur kebudayaan (*cultural universal*) yang dipopulerkan oleh Koentjaraningrat (2002, hlm. 12), yaitu, (1) Sistem religi yang meliputi: sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan; (2) Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi: kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, perkumpulan; (3) Sistem pengetahuan meliputi pengetahuan tentang: flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, tubuh manusia dan perilaku antar sesama manusia; (4) Bahasa yaitu alat untuk berkomunikasi berbentuk lisan dan tulisan; (5) Kesenian yang meliputi seni patung/pahat, relief, lukis dan gambar, rias, vokal, musik, bangunan, kesusastraan, drama; (6) Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan; (7) Sistem peralatan hidup atau teknologi yang meliputi produksi, distribusi, transportasi, peralatan komunikasi, peralatan konsumsi dalam bentuk wadah, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, dan senjata.

Rumah adat masuk ke dalam dua unsur kebudayaan sekaligus, yaitu bangunan dalam unsur kesenian dan tempat berlindung dalam unsur sistem peralatan hidup atau teknologi. Pemahaman tentang unsur kebudayaan ini menunjukkan identitas, yang mana berarti dalam karya budaya tidak lain adalah karya manusia itu sendiri. Khusus mengenai rumah adat yang merupakan bahasan unsur budaya fisik, hal ini tidak lepas dari filosofi dan nilai-nilai kebudayaan yang kental. Maka dari itu rumah adat dapat dijadikan salah satu titik tolak revitalisasi kebudayaan yang dimaksudkan.

Rumah adat dalam penelitian ini adalah *huma betang*. *Huma Betang* adalah rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah. “Rumah yang dibangun dengan cara gotong royong ini berukuran besar dan panjang mencapai 30 – 150 meter , lebarnya antara 10-30 meter, bertiang tinggi antara 3-4 meter dari tanah” (Riwut, 2003, hlm. 65). Penghuni *Huma Betang* bisa mencapai seratus bahkan dua ratus jiwa yang merupakan satu keluarga besar dan dipimpin oleh seorang *bakas lewu* atau Kepala Suku. Kalimantan Tengah memiliki budaya yang sangat beragam mulai dari agama, suku dan bahasa, walaupun demikian masyarakat Dayak penduduk asli Kalimantan Tengah tetap

menjaga persatuan agar perbedaan yang ada tidak menjadi masalah bagi mereka. Sikap toleransi antar umat beragama mejadi salah satu contoh bagaimana warga Kalimantan Tengah menjaga kerukunan diantaranya. Hal inilah yang dianggap menjadi filosofi dari *huma betang* itu sendiri.

Huma Betang dalam istilah sehari-hari diartikan sebagai “rumah besar”. Rumah ini dihuni banyak orang dengan beragam agama dan kepercayaan tetapi tetap rukun dan damai. Sehingga *Huma Betang* adalah sebuah simbol dan filosofis kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) seperti yang terlihat di Kota Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalteng. “Melalui konsep *huma betang* itu pula berbagai program pembangunan di wilayah ini diterapkan, artinya masyarakat diajak secara toleran dan bahu membahu membangun wilayah” (Riban Satia, dalam Zainuddin, 2012). Pada kehidupan orang Dayak, Betang merupakan jantung kebudayaan Dayak, artinya pola kehidupan Betang itulah yang menjadi sumber bagi sistem nilai, pola berpikir dan pola berperilaku orang Dayak.

Berhubungan dengan hal ini, pembangunan karakter bangsa melalui kearifan budaya lokal tentu sangat diperlukan. Pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa. Pentingnya transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa adalah sebagai berikut:

- 1) Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis;
- 2) Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejewantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara;
- 3) Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajah, maupun pada zaman kemerdekaan;
- 4) Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, hlm. 1).

Pembangunan karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting, apalagi dimulai dari nilai-nilai kearifan lokal daerah. Sebab kearifan lokal merupakan pondasi kebudayaan Indonesia yang bercorak multikultural. Telah jelas disebutkan bahwa secara sosiokultural pembangunan katakter bangsa merupakan keharusan terlebih lagi bagi bangsa yang multikultural. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural semua kegiatan dan pengalaman belajar yang tercipta sangat potensial mengembangkan karakter warganegara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab melalui pengembangan aneka ragam "*instructional effects*" dan "*nurturant effects*" (Joyce and Weill: 1986; Lickona:1992; Winataputra: 1998; 2001: 2015; Marzano: 2007) (dalam Winataputra, 2016, hlm. 21).

Ketika berbicara mengenai pembangunan karakter (*character building*), maka tidak akan lepas dari disiplin ilmu Kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan ilmu Kewarganegaraan berhubungan erat dengan objek kajiannya yakni warga negara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Adapun Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu multidisipliner tentu erat kaitannya dengan sistem sosial budaya. Pada dimensi sosio kultural, Pendidikan Kewarganegaraan membahas hak dan kewajiban warga negara dalam ruang lingkup pergaulan sosial dan budaya.

Winataputra (2001) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi PKn, yakni PKn sebagai program kurikuler, PKn sebagai program akademik, dan PKn sebagai program sosial kultural. Dalam pelaksanaan program, ketiga dimensi ini dapat saja terjadi secara simultan atau secara bersamaan, khususnya dalam mencapai tujuan umum, yakni membentuk warga negara yang cerdas dan baik.

Terkait keadaban kewarganegaraan atau diartikan pula sebagai *civility/civic virtue*, dimensi sosio kultural dengan rumah adat sebagai unsur kebudayaannya, dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dieksplorasi untuk pembinaan karakter kewarganegaraan menuju keadaban kewarganegaraan. Peneliti beranggapan demikian berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang didapatkan dan dicantumkan

pada penelitian ini. Adapun keadaban yang diambil dari kata dasar ‘adab’ dan ‘beradab’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata ini erat kaitannya dengan Pancasila dan nilai-nilai kewarganegaraan. Disamping itu karena kebudayaan kerap kali disandingkan dengan peradaban, maka eksplorasi nilai-nilai falsafah *huma betang* yang dimaksud tidak boleh jauh dari unsur peradaban dan makna yang terkandung di dalamnya.

Definisi peradaban menurut Koentjaraningrat (2002, hlm. 83) yaitu

Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju dan kompleks.

Dengan batasan-batasan pengertian di atas maka istilah peradaban sering dipakai untuk hasil-hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, adat istiadat sopan santun serta pergaulan. Peradaban yang baik diisi oleh peran warga negara yang seimbang. Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk membentuk kebajikan atau keadaban pada diri masing-masing warga negara. Untuk itu menurut Khilmiyah (2016, hlm iv), pendidikan kewarganegaraan secara psikopedagogis atau andragogis dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks mengembangkan kecerdasan kewarga negaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civic committment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*).

Peneliti tertarik menggali nilai-nilai kebajikan atau keadaban kewarganegaraan yang terkandung dalam *huma betang* sebagai unsur kebudayaan tanah air, khususnya di Suku Dayak Kalimantan Tengah. *Huma Betang* yang merupakan rumah panjang tempat tinggal suku Dayak hingga saat ini masih ada yang dipelihara dan ditinggali. Pola hidup yang tercipta dari keberadaan *Huma Betang* ini berkaitan erat dengan

Chris Apandie, 2017

FALSAFAH HUMA BETANG SUKU DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN NILAI KEADABAAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembentukan karakter warga negara berdasarkan parameter kompetensi kewarganegaraan. Peneliti beranggapan bahwa banyak sekali nilai-nilai keadaban kewarganegaraan yang dapat dieksplorasi terkait filosofi *huma betang*. Dengan demikian dapat menjadi masukan untuk merevitalisasi pembelajaran PKn agar lebih kontekstual khusus di lingkungan Kalimantan Tengah dengan prosedur yang selama ini telah diimplementasikan. Kemudian secara non formal di masyarakat, falsafah *huma betang* ini dapat dijadikan pedoman atau pandangan hidup yang patut dilestarikan dan diwariskan sebagai nilai-nilai luhur dengan asumsi melalui hal ini merupakan salah satu langkah untuk melestarikan dan merevitalisasi unsur-unsur lokal budaya daerah.

Dengan demikian revitalisasi budaya yang memiliki visi bagi terwujudnya bangsa Indonesia yang mampu memperkuat jati diri dan karakter bangsa serta kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan terutama pada dimensi sosio kultural. Masyarakat memerlukan edukasi dalam pewarisan nilai-nilai yang tidak hanya berlangsung di institusi formal seperti sekolah. Diperlukan juga pewarisan nilai budaya yang dibiasakan di masyarakat, seperti halnya falsafah *huma betang* suku Dayak Kalimantan Tengah ini. Jika semakin banyak nilai-nilai luhur dari sistem kebudayaan yang dieksplorasi dan diangkat melalui karya ilmiah, harapan jangka panjang yang dicita-citakan ialah warga negara Indonesia mampu memelihara kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional sebagai identitas kebangsaan. Sehingga mampu dijadikan senjata dalam mempertahankan diri dari gempuran arus globalisasi yang tidak terelakkan.

B. Identifikasi Masalah

1. Lunturnya kebudayaan nasional menjadi titik tolak pemikiran perlunya revitalisasi budaya nasional. Salah satu unsur kebudayaan yang hampir punah adalah eksistensi *huma betang* di wilayah masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.
2. Revitalisasi budaya dapat dimulai dari pengangkatan nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya dari filosofi rumah adat (*huma betang*).

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu multidisipliner perlu diperkaya dalam kaitannya dengan budaya daerah. Pada dimensi sosio kultural, PKn saling melengkapi dari perbedaan dan keragaman budaya di Indonesia. Harmonisasi dan saling melindungi antar warga dalam pergaulan sosial budaya daerah menjadi salah satu yang perlu dikembangkan oleh setiap warga negara. Adapun signifikansi antara budaya dan bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan sendiri ada pada pijakan teori *civic culture*. *Civic culture* yang berarti budaya kewarganegaraan perlu dijaga, dipelihara, dan direvitalisasi sebagai unsur kebudayaan nasional. Sebab budaya kewarganegaraan ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dan suatu proses pembudayaan proses pembinaan watak, jati diri, serta keadaban warga negara.
4. Terkait keadaban kewarganegaraan atau diartikan pula sebagai *civility/civic virtue*, dimensi sosio kultural dengan rumah adat sebagai unsur kebudayaannya, dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dieksplorasi untuk pembinaan karakter kewarganegaraan menuju keadaban kewarganegaraan.
5. Nilai-nilai luhur pada dasarnya perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemeliharaan budaya dan sebagai bentuk upaya pertahanan terhadap terpaan budaya asing dengan budaya lokal daerah sebagai penangkalnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan batasan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana eksistensi *huma betang* pada masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah sejak berdiri hingga saat ini ?
2. Bagaimana nilai-nilai keadaban kewarganegaraan diimplementasikan pada keberadaan *huma betang* Suku Dayak Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana manfaat dari eksistensi dan implementasi falsafah *huma betang* terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?

Chris Apandie, 2017

FALSAFAH HUMA BETANG SUKU DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN NILAI KEADABAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Bagaimana nilai-nilai yang mapan dan terpelihara hingga saat ini pada falsafah *huma betang* kaitannya dengan keadaban kewarganegaraan?
5. Bagaimana sistem pewarisan nilai pada falsafah *huma betang* suku Dayak Kalimantan Tengah?

D. Tujuan

Secara umum tujuan penelitian ialah untuk mengeksplorasi serta menginformasikan tentang unsur budaya (bangunan/rumah adat) Suku Dayak Kalimantan Tengah, yaitu *huma betang*. Kaitannya dengan pemeliharaan nilai-nilai keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*).

Secara khusus tujuan penelitian difokuskan sesuai dengan batasan permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, yakni

1. Mengungkap unsur kebudayaan yaitu eksistensi *huma betang* pada masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah sejak berdiri hingga saat ini
2. Mengeksplorasi nilai-nilai keadaban kewarganegaraan diimplementasikan pada keberadaan *huma betang* Suku Dayak Kalimantan Tengah
3. Mengidentifikasi manfaat dari eksistensi dan implementasi falsafah *huma betang* terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
4. Menggali nilai-nilai yang mapan dan terpelihara hingga saat ini pada falsafah *huma betang* kaitannya dengan keadaban kewarganegaraan.
5. Mengetahui secara lebih mendalam tentang sistem pewarisan nilai pada falsafah *huma betang* suku Dayak Kalimantan Tengah.

E. Manfaat

Secara umum manfaat dari penelitian ini ditinjau dari berbagai aspek diantaranya

1. Segi Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pada keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam dimensi sosio kultural. Sebab penelitian tentang kebudayaan sedikit banyak memiliki

keterkaitan baik itu sebagai titik tolak kewajiban warga negara untuk melestarikan budayanya, ataupun pada aspek pendidikan di sekolah dan di masyarakat sebagai suatu sumber pembelajaran berbasis kearifan lokal.

2. Segi Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian tentang eksplorasi nilai-nilai keadaban kewarganegaraan pada rumah adat suku Dayak (*huma betang*), dapat menjadi contoh revitalisasi kebudayaan daerah dari aspek teknologi dan peralatan hidup untuk senantiasa menjadi dasar perkembangan pola tingkah laku dan pembiasaan nilai-nilai kehidupan bagi warga negara dalam ruang lingkup terkecil. Disamping itu secara praktik penelitian ini dapat menjadi bentuk refleksi dalam meningkatkan kesadaran warga negara terhadap pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal terutama pada unsur kebudayaan yang hampir ditinggalkan.

3. Segi Isu/Kebijakan

Dari segi isu atau kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat berimplikasi pada terciptanya pemikiran atau gagasan untuk merevitalisasi kebudayaan baik itu dari segi aksi sosial maupun kebijakan seperti peraturan daerah dan lembaga adat. Meski fakta di lapangan telah membuktikan keberadaan kebijakan mengenai pelestarian cagar budaya dan revitalisasi kebudayaan, tetap harus diperkuat dengan berbagai tindak lanjut dalam penelitian sehingga terbentuk suatu gagasan yang kokoh dan implikatif.

F. Struktur Organisasi Tesis

Susunan penulisan yang dirancang dalam penelitian ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Bab I berisi bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, serta penelitian terdahulu yang akan memperkuat dan mendukung pembahasan penelitian. Bab kajian pustaka pada penelitian ini terbagi menjadi dua

konsep utama, yaitu konsep kebudayaan (*huma betang*) dan konsep keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*).

Bab III berisi metodologi penelitian yang menjelaskan prosedur penelitian berupa desain penelitian, metode penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, hingga analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang akan dijelaskan dengan dikomparasikan bersama teori-teori yang telah diangkat pada Bab kajian pustaka, sehingga hasil dari penelitian dapat kontras terlihat.

BAB V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulan ini disusun berdasarkan rumusan masalah dengan tujuan dapat menyajikan benang merah dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diangkat. Kemudian rekomendasi disajikan dengan ditujukan pada beberapa pihak dari mulai akademisi PKn hingga masukan untuk penulis/peneliti selanjutnya.